

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN
TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk
Mencapai
Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos)

Oleh

VICKRY AULIA HIDAYAH HSB

13.15.4.033

Program Studi :Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

2019

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN
TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk
Mencapai
Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos)

Oleh

VICKRY AULIA HIDAYAH HSB

13.15.4.033

Program Studi :PengembanganMasyarakat Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Efi Brata Madya, M. Si
Nip19670610 199403 1 003

Dr. H. Muaz Tanjung, MA
Nip.19661019 200501 1 003

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vickry Aulia Hidayah Hsb
NIM : 13154033
Jurusan/Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam/ S.I
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang sudah saya jelaskan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya saya ucapkan terimakasih,.

Medan, 12 November 2019

Yang buat pernyataan

Vickry Aulia Hidayah Hsb

13154033

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA RASAU KECAMATAN
TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

Oleh
Vickry Aulia Hidayah Hsb
NIM 13154033

ABSTRAK

Kemiskinan di desa Rasau Kecamatan Torgamba menuntut kehadiran pemerintah, terutama Dinas Sosial Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 17 tahun 2010 bahwa tugas pokok Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi dibidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan yang berjalan saat ini sangat membantu masyarakat terutama untuk pendidikan dan kesehatan yang dimana hal itu menjadi tujuan PKH untuk mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan mutu kesehatan dan tingkat pendidikan keluarga miskin penerima PKH. Dalam pelaksanaannya melalui PKH dinas sosial telah mencapai hasil yang saat ini dikatakan sudah tercapai dimana pelayanan kesehatan di Desa Rasau sudah lebih baik dan rasa peduli akan kesehatan. Program Keluarga Harapan telah berjalan kurang lebih 12 tahun telah banyak membantu masyarakat kurang mampu di sektor pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan baik bagi balita, lansia dan ibu hamil di Puskesmas dan Rumah sakit. Untuk pendidikan pemberian bantuan Beasiswa bagi masyarakat kurang mampu untuk biaya pendidikannya melalui BOS dan PKH. Gizi semakin tinggi. Begitu juga dengan pendidikan. Orang tua terbantu dengan adanya bantuan beasiswa pendidikan PKH untuk keperluan pendidikan mereka.

Hasil yang dicapai Dinas Sosial sebagai Fasilitator dan pengawas dalam mengatasi kemiskinan ialah penerima PKH sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi dengan baik. Untuk pendidikan pencapaian yang didapat Dinas Sosial ialah telah mempunyai masyarakat miskin memenuhi kebutuhan sekolah baik seragam dan alat tulisnya. Semakin rajin dan giat anak-anak penerima PKH untuk sekolah tanpa memikirkan biaya pendidikan mereka dengan bantuan pemerintah.

Kata kunci: *peran dinas sosial, mengatasi kemiskinan, program keluarga harapan*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh Umat manusia. Shalawat dan salam, penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, serta kepada umatnya yang selalu setia mengikuti petunjuk-petunjuknya hingga akhir zaman.

Dengan taufik, rahmat dan hidayah-Nya penulis telah menyelesaikan Skripsi ini sebagai bentuk perjuangan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul **“PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA RASAU KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya yang masih sangat sederhana. Namun, penulis persembahkan dihadapan para pembaca yang budiman, semoga setelah menelaah isinya berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah memberi bantuan dan partisipasinya dalam usaha penyelesaian skripsi ini terutama ditujukan kepada:

1. Ayahanda Ir. Syahrul Hidiyah Hasibuan dan Ibunda Hesti Herawati dan keluarga yang dengan Ikhlas tanpa mengenal lelah mengasuh dan mendidik penulis sejak kecil sampai sekarang, dan selalu mendoakan agar penulis selalu diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Soiman, MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Drs. Efi Brata Madya, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Drs. Abdurrahman M.Pd selaku Wakil Dekan 2, dan Bapak Muhammad Husni Ritonga, MA selaku Wakil dekan III.
4. Bapak Dr. H. Muaz Tanjung, MA selaku Ketua Jurusan PMI, Bapak Dr. Salamuddin, MA selaku sekretaris jurusan PMI beserta stafnya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak Dr. Efi Brata Madya, M. Si dan Bapak Dr. H. Muaz Tanjung, MA selaku pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memotivasi serta memberikan kontribusi berupa nasihat dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan akademik serta pegawai tata usaha yang telah banyak membantu mahasiswa dalam proses kelancaran kegiatan akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU Medan.
7. Kepala Dinas Sosial, Tokoh Masyarakat, Dan tokoh agama Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang telah meluangkan dan memberikan jawabannya sehingga membantu terselesainya proposal ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) stambuk 2015 yang telah memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. Selalu memberikan balasan yang terbaik kepada semuanya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah, *Amin Ya Rabbal`Alamin.*

Penulis, 6 Januari 2020

Vickry Aulia Hidayah Hsb

13.15.4.033

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Istilah	6
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematis pembahasan	11
 BAB II LANDASAN TEORITIS	 12
A. Pengertian Peran	12
B. Perananan Dinas Sosial	15
C. Kemiskinan	17
D. Program Keluarga Harapan (PKH)	26
E. Penelitian terdahulu	30
 BAB III METODE PENELITIAN	 31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis data dan Keabsahan Data	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan	38
B. Profil Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan	43
C. Kondisi Umum Desa Rasau Kecamatan Torgamba	45
D. Peran Dinas Sosial dalam mengatasi Kemiskinan	46
E. Faktor yang mempengaruhi kebijakan PKH di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan	48
F. Strategi Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan melalui PKH	50
G. Respon Masyarakat Adanya PKH	53
H. Hasil yang dicapai Dinas Sosial mengatasi Kemiskinan melalui PKH	55
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
 Daftar Pustaka	62
 Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan terus menjadi persoalan masyarakat dan negara di dunia ini dari masa ke masa baik dari tingkat Desa hingga Kota dan menjadi masalah yang serius dihadapi terutama bagi Negara berkembang. Karena di satu sisi menentukan tingkat perkembangan suatu masyarakat dan di sisi lain menjadi salah satu indikator tidak berhasilnya proses pembangunan. Kemiskinan juga menjadi tanda dari perkembangan ekonomi pasar yang timpang dan kemunduran berbagai institusi sosial di dalam memecahkan persoalan penduduk.

Bagi Indonesia persoalan kemiskinan menjadi satu persoalan tersendiri yang dari tahun ke tahun tidak pernah terselesaikan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia, dan diperlukan suatu strategi yang terpadu. Hal ini karena persoalan kemiskinan lebih bersifat multi dimensi dari pada persoalan lainnya yang dihadapi oleh bangsa ini. Usaha memerangi kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Pemerintah juga terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan program penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor kehidupan.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran. Pembangunan kesejahteraan sosial, dan khususnya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pusat dan Pemerintah Daerah. Kemiskinan merupakan program prioritas nasional, sehingga memerlukan pemahaman dan komitmen yang sama itulah tentu akan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan di setiap daerah.

Kemiskinan di desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan salah satu masalah sosial menuntut perhatian pemerintah Kecamatan Torgamba. Berdasarkan data tahun 2019 di Dinas sosial dan Ketenaga Kerjaan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan yaitu berjumlah 102 kepala keluarga. Masalah kemiskinan ini merupakan permasalahan sosial yang paling menonjol, selain populasinya yang menonjol, kemiskinan ini telah melahirkan permasalahan sosial baru, seperti keterlantaran anak, dan tidak optimal pengasuhan anak oleh keluarga.

Kemiskinan di desa Rasau Kecamatan Torgamba menuntut kehadiran pemerintah, terutama Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Mata pencaharian Masyarakat Torgamba adalah daerah perkebunan yang hidup dari hasil karet dan sawit, sehingga perlu Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan memberikan suatu solusi untuk pemecahan permasalahan ini dengan menjalankan fungsinya dengan baik, hal ini merupakan suatu tujuan utama daerah dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial, dan salah satu tugas dan fungsi Dinas Sosial memerlukan dukungan yang berkaitan dengan sumber daya manusia sarana prasarana, anggaran (APBD) dan manajerial, berbagai aspek tersebut apabila dapat dipenuhi, maka tujuan program dapat dicapai secara optimal, pada era otonomi daerah ini, pemerintah daerah telah mendapatkan penguatan program dari pusat pada penanggulangan kemiskinan, melalui dana Kementerian Sosial.

Fakir miskin, dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” negara bertanggung jawab terhadap anak-anak terlantar, di kota banyak sekali gelandangan, pengemis, pengamen terlihat di jalanan untuk memenuhi kehidupan mereka, kurangnya perhatian terhadap anak-anak terlantar, dan terlihat tidak semua masyarakat menikmati kesejahteraan di dalam negara, dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam surah Al-Maun ayat 2 dan 3:

فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۖ

Artinya: “Maka itulah yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin”. (Q.S. Al-Maun ; 2-3) ¹

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa sebagai umat manusia kita harus saling membantu dalam kehidupan bahwa jelas adanya kehidupan orang miskin yang seharusnya di bantu apalagi sebagai yang sangat tidak beruntung, Perbedaan keadaan manusia ternyata tidak sebatas jenis kelamin, suku, bangsa, dan ras atau warna kulitnya tetapi juga dalam kehidupan ekonomi yang mereka alami, disamping itu terdapat orang yang beruntung memiliki ekonomi yang mapan ada juga masyarakat yang memiliki ekonomi yang kurang beruntung dalam kehidupan ekonominya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyatnya sebagaimana di ungkapkan dalam pembukaan UUD 1945, Oleh karena itu salah satu solusi untuk menangani problema itu adalah dengan adanya Dinas Sosial. ini adalah lembaga sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin agar potensi dan kapasitas kehidupannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh negara dengan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakatnya, dari uraian di atas fakir miskin adalah permasalahan sosial yang harus ditanggulangi oleh negara melalui program penanggulangan kemiskinan, seperti program BLT (Bantuan Langsung Tunai) disempurnakan dengan program yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat menciptakan kemandirian pada masyarakat. BLT yaitu program pemerintah untuk memberikan

¹*Al-Quran & Terjemahan Spesial For Women*, Depertemen Agama RI

bantuan berupa uang tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat.² Dinas Sosial memberikan kontribusi bagi masyarakat miskin agar ditanggulangi dengan baik, hal ini sebuah kewajiban pemerintah untuk memperhatikan masyarakatnya agar kesejahteraan yang di maksudkan telah menyeluruh dan dirasakan oleh masyarakat miskin sekalipun.

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah dalam penelitian ini adalah meskipun pemerintah telah memberikan segala upaya untuk penanggulangan kemiskinan tetapi masih banyak masyarakat miskin di desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sehingga penulis melakukan penelitian ini berjudul **Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Rasau Kecamatan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.** Untuk mengetahui secara jauh bagaimana peran dinas sosial dalam mengatasi kemiskinan dan masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang dimaksudkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah keadaan dalam latar belakang masalah diatas maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi Implementasi kebijakan PKH di Desa Rasau Kecamatan Torgamba ?

²Departemen Sosial RI, 2008.

2. Bagaimana Strategi Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan melalui PKH ?
3. Bagaimana Respon masyarakat setelah adanya PKH ?
4. Bagaimana hasil yang dicapai Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan melalui Program PKH ?

C. Batasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah dalam penelitian ini diperlukan penegasan istilah yang terdapat dalam judul yaitu :

1 Peran

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Jadi pengertian peran dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam terjun ke dunia sesungguhnya sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.³

2 Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemeriksaan psikologis memungkinkan kita untuk memprediksi performa pekerja sebelum mereka bekerja memberikan bantuan kepada warga.

³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1997, hal. 540

Menurut UU No 40 tahun 2004 tentang system jaminan sosial, UU No 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin, Perpres No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan serta INFRES No 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan

3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan materi dasar berdasarkan standar tertentu. Adapun standar ini lebih dikenal dengan garis kemiskinan, yaitu tingkat pengeluaran atas kebutuhan pokok yang meliputi sandang, pangan, papan secara layak penyebab kemiskinan bisa dilihat dari beberapa sisi yaitu:

- a. Penyebab Individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
- b. Penyebab keluarga, yang menghubungkan dengan pendidikan keluarga.
- c. Penyebab sub budaya, menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
- d. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
- e. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan berasal hasil dari struktur sosial.⁴

⁴Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. hal. 321

4 Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).⁵

Penelitian yang saya lakukan dengan judul Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk mengetahui Strategi dan kebijakan serta menggali informasi lebih mengenai peran dinas sosial yang menjadi fasilitator dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia tak terkecuali di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan menjadi program andalan dinas sosial untuk mengatasi kemiskinan masyarakat. Tidak hanya meneliti dan menggali informasi dari fasilitator PKH namun penelitian saya akan menggali respon dan hasil yang telah diterima masyarakat melalui Program Keluarga Harapan.

Masyarakat penerima Program Keluarga Harapan menjadi informan bagi saya untuk informasi yang lebih akurat mengenai Peran Dinas Sosial mengatasi

⁵Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 Ayat 1, hal 3

kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat kurang mampu. Apakah sudah sesuai target baik pelaksanaannya maupun penerima Program.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya Peran adalah tindakan atau perilaku seseorang baik dipemerintahan, Organisasi, Rumah dll yang dilakukannyaberdasarkan posisi dan tujuan yang ingin dicapai di lingkungan tersebut. Sedangkan Dinas Sosial ialah sebuah instansi Pemerintah yang bekerja dibawah kementerian Sosial untuk mengatasi permasalahan sosial di masyarakat agar lebih baik.

Kemiskinan dapat diartikan menurut peneliti adalah ketidakmampuan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan primer maupun sekunder untuk mempertahankan hidup. Hal ini bisa terjadi karena pendidikan yang rendah maupun pendapatan yang rendah akibat tidak memiliki keahlian dan pekerjaan tetap. Lalu pemerintah membantu mengatasinya melalui Program Keluarga Harapan (PKh) yang menurut peneliti PKH adalah bantuan yang diberikan pemerintah bagi masyarakat miskin untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan mereka agar dapat keluar dari zona kemiskinan yang di alami.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Torgamba

2. Untuk mengetahui Strategi Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Untuk mengetahui Respon masyarakat setelah adanya Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Untuk mengetahui hasil yang dicapai Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu khususnya Ilmu Pemerintahan khususnya birokrasi pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Selain itu dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak yang berkompeten dalam bidang ini.

2 Manfaat praktis

Secara praktikal hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Kelurahan dalam menentukan kriteria kemiskinan. Dijadikan bahan evaluasi untuk dapat menjadi solusi untuk penentuan bagi kemiskinan penduduk khususnya yang terkait dengan peranan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan penduduk

F. Sistematis Pembahasan

Untuk menentukan pembahasan, maka proposal ini disusun secara sistematis dan teratur. Mulai dari pendahuluan sampai kepada penutup dan kesimpulan dan terdiri dari bab dan sub-sub yang saling berkaitan.

Bab I, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II, membicarakan landasan teoritis yang terdiri dari kerangka teori, kerangka konsep dan kajian terdahulu

Bab III, membahas tentang metodologi penelitian dengan sub judul yang membahas lokasi penelitian, informan penelitian, dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, yang membahas tentang: hasil penelitian yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian.

Bab V Penutup, yang membahas tentang: Kesimpulan dan Saran dari pembahasan yang telah dikumpulkan sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Peran

Teori peran (role theory) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.⁶

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.⁷

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

⁶Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hal. 221.

⁷*Ibid*.... hal. 223.

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat⁸

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Fungsi berasal dari kata dalam bahasa inggris (function), yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang

⁸*Ibid....* hal. 224.

tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.⁹

Secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat wewenang diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Wewenang tidak diartikan kuasa (an sich), oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis (asas umum) pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

1. Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
2. Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
3. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang; seluruh hak atau kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.¹⁰

Pengertian diatas menunjukan bahwa tugas dan fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melakukan hubunganhubungan hukum.

⁹Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hal. 51.

¹⁰Prajudi Admosudirjo. *Teori Kewenangan*. PT . Rineka Cipta Jakarta. 2001. hal. 6

B. Peran Dinas Sosial

1. Peran Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemeriksaan psikologis memungkinkan kita untuk memprediksi performa pekerja sebelum mereka bekerja memberikan bantuan kepada warga. Menurut UU No 40 tahun 2004 tentang system jaminan sosial, UU No 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin, Perpres No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan serta INFRES No 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan.¹¹

Ketenaga kerjaan berupaya untuk meningkatkan fungsi sosial individu-individu baik secara individual maupun dalam kelompok dengan kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada relasi-relasi sosial mereka yang merupakan interaksi diantara manusia dengan lingkungannya kegiatan-kegiatan ini dikelompokkan menjadi tiga fungsi:

- a. Perbaikan kapasitas yang terganggu .
- b. Pengadaan sumber-sumber individu dan sosial.
- c. Pencegahan terjadinya disfungsi sosial.¹²

¹¹UU No 40 tahun 2004 *tentang sistem jaminan sosial*, UU No 13 tahun 2011

¹²Ridlo, Mohammad Agung.. *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: Penerbit Unissula Press ,200. hal 121

Sebagai satuan kerja perangkat 'daerah, Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Daerah. Peran atau upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Siak antara lain:

- a. Melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
- c. Memperluas ketahanan sosial masyarakat.
- d. Meningkatnya profesionalisme aparatur yang berbasis kesejahteraan sosial.¹³

2. Tugas Dinas Sosial

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 17 tahun 2010 bahwa tugas pokok Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi dibidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial Dan Jaminan Sosial Serta Tugas Pembantuan.¹⁴

3. Fungsi Dinas Sosial

Dinas sosial memiliki beberapa fungsi yang harus dijalankan yaitu sebagai berikut:

¹³ "<http://dinsos.sumutprov.go.id/statis-4/tugas-pokok-dan-fungsi.html>

¹⁴ Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 17 tahun 2010

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial
- c) Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang kesejahteraan sosial
- d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial
- e) Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kesejahteraan sosial
- f) Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya¹⁵

C. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk

¹⁵*Ibid* Pasal 5

makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold).¹⁶

Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki oleh si miskin. Penduduk pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraannya sehingga menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan formal maupun nonformal dan membawa konsekuensi terhadap pendidikan informal yang rendah.¹⁷

Defenisi kemiskinan terbagi atas tiga yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang.¹⁸

Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan

¹⁶Ridlo, Mohammad Agung.. *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: Penerbit Unissula Press ,2001, hal 231

¹⁷*Ibid*...196

¹⁸Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko. 1997, hal 137

dasar.¹⁹ Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya²⁰

Menurut Sar A. Levitan dalam Ala menyatakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak.²¹

Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.²²

Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial yang meliputi: aset, sumber-sumber keuangan, organisasi dan jaringan sosial, pengetahuan dan informasi untuk memperoleh pekerjaan menjadikan seseorang menjadi miskin.²³

¹⁹Mikkelsen, Britha.. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Terjemah: Matheos Nalle Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003, hal 194

²⁰Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko. 1997, hal 140

²¹www.BPS.SUMUT.com

²²Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN

²³Ridlo, Mohammad Agung. *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: Penerbit Unissula Press. 2001. hal 8

Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial kemiskinan diartikan kekurangan jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan.²⁴

Tinjauan yang sama dengan penjelasan yang berbeda dikemukakan Nugroho dan Dahuri. Dari aspek ekonomi, kemiskinan merupakan kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif) dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Dari aspek sosial, kemiskinan mengindikasikan potensi perkembangan masyarakat yang rendah. Sedangkan dari aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan rendahnya kemandirian masyarakat.²⁵

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional memberikan definisi kemiskinan dengan basis keluarga. Keluarga yang termasuk kategori miskin adalah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Sedangkan Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum memenuhi seluruh

²⁴Efendi, Tadjuddin Noer. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana. 1993. Hal 204

²⁵Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. *Pembangunan Wilayah- Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004. Hal 166

kebutuhan sosio psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga dan lingkungan dan transportasi.²⁶

Menurut Rusli harus dibedakan antara kemiskinan, ketidakmerataan, keterisolasian dan keterbelakangan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi standar kebutuhan minimum tertentu. Ketidakmerataan lebih menekankan pada standar hidup relatif diantara anggota masyarakat. Keterisolasian menyangkut ketidakmampuan sekelompok orang untuk berhubungan secara teratur dan mudah dengan masyarakat lainnya, sedangkan keterbelakangan menyangkut kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai kebutuhan serta kondisi kehidupan yang lebih baik.²⁷

2. Penyebab Kemiskinan

Pada umumnya indikator kemiskinan menggunakan kriteria garis kemiskinan (Poverty line) untuk mengukur kemiskinan absolut. Salah satu kriteria Garis Kemiskinan yang digunakan adalah versi BPS (Badan Pusat Statistik)²⁸

Batas Kemiskinan pada masing-masing daerah berbeda-beda karena didasarkan pada lokasi yang berbeda dan standar kebutuhan hidup masing-masing daerah. BPS (Badan Pusat Statistik) membatasi yang dikatakan miskin dari segi besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100

²⁶[http://www.Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.com](http://www.Badan%20Koordinasi%20Keluarga%20Berencana%20Nasional.com)

²⁷Rusli, Said (ed). *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin: Suatu Tinjauan dan Alternatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Utama dan Institut Pertanian Bogor.,1995.hal 52

²⁸Kuncoro, Mudrajat.. *Otonomi Daerah - Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga. 2004. Hal 142

kalori per hari. Sedangkan pengeluaran minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang serta aneka barang dan jasa.²⁹

BPS menggunakan dua pendekatan dalam menentukan garis kemiskinan tersebut, yaitu Pendekatan Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Approach*) dan Pendekatan *Head Count Index*. Pendekatan Pertama, merupakan pendekatan yang melandaskan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan pendekatan kedua, menggunakan ukuran kemiskinan absolut, dimana Jumlah penduduk yang berada dibawah suatu batas garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Artinya, komponen garis kemiskinan terdiri dari 2 (dua) Komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (Food Line) dan garis kemiskinan non makanan (Nonfood Line).³⁰

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumber daya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan 27 yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan

²⁹www.BPS.SUMUT.com

³⁰Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. *Pembangunan Wilayah- Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 2004. hal 167

kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan³¹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (chronic poverty) yang disebabkan:

- a) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif;
- b) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan
- c) rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan sementara (transient poverty) yang disebabkan perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi;
- d) perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan;
- e) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Batas Kemiskinan juga dijabarkan oleh pakar lainnya bahwa: "Dalam konteks pembangunan yang berpusat pada manusia, aspek relativitas ini penting karena menunjukkan pola hubungan struktural antara wilayah atau komunitas. Sebagaimana diketahui, pembangunan yang berpusat pada manusia mendasarkan dari pada teori penanggulangan kemiskinan struktural (bukan kemiskinan absolut) ³²

³¹Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed).. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko. 1997. hal 137

³²Sajogyo.. *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta. 1996

Kalaupun menggunakan suatu garis penanda kemiskinan atau ketertinggalan wilayah, argumennya tetap diarahkan pada pengurangan kesenjangan antar manusia, kelompok, komunitas dan wilayah. Dengan demikian dimungkinkan suatu proses pemberdayaan, berupa penanggulangan resiko komunitas dengan cara menambah tenaga/kapasitas bagi lapisan tertinggal untuk menembus struktur menuju lapisan yang lebih maju

Ada banyak penjelasan mengenai penyebab Kemiskinan. di dalam mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro: kemiskinan muncul akibat dari adanya perbedaan pola pemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Kedua, timbulnya kemiskinan akibat dari adanya perbedaan Kualitas Sumber Daya Manusia. Perbedaan SDM tersebut antara lain dari Sisi Pendidikan yang rendah, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Dan yang Ketiga, munculnya kemiskinan akibat dari perbedaan akses dalam modal.³³

3. Jenis Kemiskinan

- a) Pembagian jenis kemiskinan dapat dibagi berdasarkan pola waktu. menurut pola waktu tersebut kemiskinan dapat dibagi menjadi:
Persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun yang diantaranya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi.

³³Kuncoro, Mudrajat. *Otonomi Daerah - Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga. 2004.. hal 157

- b) *Cyclical poverty* yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
- c) *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan.
- d) *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan³⁴

Berdasarkan jenisnya kemiskinan secara umum dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat tersebut. Meskipun seseorang/ masyarakat telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (tidak miskin), tetapi masih rendah kualitasnya dibandingkan masyarakat sekitarnya yang relatif lebih kaya.³⁵

Kemiskinan absolut keberadaannya masih dapat dihilangkan (*poverty alleviation*), sedangkan kemiskinan relatif keberadaannya tidak dapat dihilangkan, tetapi hanya dapat dikurangi intensitasnya (*poverty reduction*)³⁶

³⁴Ridlo, Mohammad Agung. *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: Penerbit Unissula Press. 2001. hal 11

³⁵*Ibid.*..hal 10

³⁶Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko. 1997.hal 138

Berdasarkan uraian tersebut, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus menerus berkembang dan perlu diatasi oleh berbagai lapisan baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.

D. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.³⁷

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

³⁷<https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1> diakses 26 Desember 2019, Pukul 21.15 wib

Melalui PKH didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan Program Keluarga Harapan saat ini mengacu pada Permensos 1 Tahun tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 yaitu:

- a) untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;

- b) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e) mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.³⁸

3. Sasaran Program Keluarga Harapan

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Ditegaskan dalam Permensos 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3. Bahwa Sasaran PKH yaitu: Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau

³⁸Permensos 1 Tahun tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2

seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.³⁹

4. Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun. Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2019, sebagai berikut:

40

Tabel. Indeks dan Komponen bantuan sosial program keluarga harapan tahun 2019.

No	Komponen	Indeks Bantuan	
BANTUAN TETAP SETIAP KELUARGA		Semula	Menjadi
1	Bantuan Tetap PKH Reguler	550.000	550.000
2	Bantuan Tetap PKH Akses	1.000.000	1.000.000
BANTUAN KOMPONEN SETIAP JIWA			
1	Bantuan Kategori Ibu Hamil	2.400.000	2.225.000
2	Bantuan Kategori Anak Usia 0 s/d Sederajat	2.225.000	2.225.000
3	Bantuan Kategori Anak SD/Sederajat	900.000	850.000
4	Bantuan Kategori Anak	1.500.000	1.400.000

³⁹Permensos 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3

⁴⁰Perubahan pertama keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial PKH 2019*, Kementerian Sosial Republik Indonesia. lampiran

	SMP/Sederajat		
5	Bantuan Kategori Anak SMA/Sederajat	2.000.000	1.850.000
6	Bantuan Kategori Penyandang Disabilitas Berat	2.400.000	2.225.000
7	Bantuan Kategori Lanjut Usia 60 Tahun ke atas	2.400.000	2.225.000

E. Kajian Terdahulu

Skripsi Dasril Arifin, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, “Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak (Studi Kasus di Kecamatan Sei Mandau)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa program yang diberikan Dinas Sosial Terhadap masyarakat miskin di Kecamatan Sei Mandau dalam penanggulangan angka kemiskinan dengan program dan pelayanan yang di buat oleh pemerintah dengan kelompok usah dan pemberdayaan serta layanan bantuan tunai langsung untuk masyarakat miskin dan mampu mengolah dengan baik dan menciptakan kesejahteraan di Kecamatan Sei Mandau dan mengurangi angka kemiskinan.⁴¹

⁴¹Skripsi Dasril Arifin, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, “*Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak (Studi Kasus di Kecamatan Sei Mandau)*” UIN SUSKA.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi. Sistematis dan terorganisasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, maka penelitian dilakukan dengan cara-cara (prosedur) tertentu yang telah diatur dalam sebuah metode baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan ketentuan metode-metode yang dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian⁴²

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif Pendekatan ini berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang yang diteliti, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan uraian tentang ucapan, tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh.

Dalam hal ini subjek yang diteliti adalah Peran Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan . Penelitian ini akan menghasilkan temuan-temuan baru dalam bentuk uraian dan paparan dari hasil penelitian.

⁴²Rosady Ruslan, *Metode penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2008), hal. 7.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Peneliti tertarik memilih Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan karena ingin mengetahui dan melihat bagaimana kemiskinan dikendalikan dan di perbaiki agar berkurang angka kemiskinan di kecamatan Torgamba.

C. Sumber data

Adapun aktifitas yang dilakukan adalah membuat basis data kasus dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian ini untuk sumber dan jenis data yang diperlukan, yaitu :

1 Data Primer

Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang di teliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Sedangkan untuk pengambilan data dilakukan dengan bantuan catatan lapangan, bantuan foto atau bila memungkinkan dengan bantuan rekaman suara tape recorder dan observasi mendalam oleh peneliti.

2 Data sekunder

Berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini akan digunakan semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan penelitian ini. Diantaranya buku-buku, literatur, internet, majalah, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait

dengan penelitian ini. Pada fungsi yang optimal dapat memberikan pemahaman teoritik dan metodologi yang melandasi dalam melakukan penelitian yang benar⁴³

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk memperoleh data yang akurat dilakukan wawancara dengan beberapa Informan sebagai berikut :

1. Nama : Indra Arya, SE
Alamat : Kota Pinang
Pekerjaan : Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial LabuhanBatu Selatan
Pendidikan : S1
Usia : 40 Tahun
2. Nama : Santi Fransiska
Alamat : Desa Rasau
Pekerjaan : Pendamping PKH Desa Rasau
Pendidikan : SMA
Usia : 35 Tahun
3. Nama : Safridah Hsb

⁴³Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian politik* (Jakarta : Kencana, 2007)hal.35

Alamat : Dusun Rasau Pekan Desa Rasau Kecamatan Torgamba

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SMA

Usia : 43 Tahun

4. Nama : Siti Asdah Siregar

Alamat : Dusun Rasau Pekan Desa Rasau Kecamatan Torgamba

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SMA

Usia : 38 Tahun

5. Nama : Sri Dahlia

Alamat : Gariang Sordang Desa Rasau Kecamatan Torgamba

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SMA

Usia : 32 Tahun

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

1. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan tanya jawab untuk mendapatkan tanggapan dari responden atau *key informan* yang diteliti

2. Observasi Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati kegiatan mengatasi kemiskinan masyarakat dengan mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsungnya, dan biasanya peneliti dapat sebagai partisipan atau *observer* dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek peristiwa yang sedang diteliti
3. Dokumentasi

Dilakukan oleh peneliti untuk melakukan kontak dengan pelaku atau sebagai partisipan yang terlibat pada suatu peristiwa sejarah masa lalu dan terdapat dua jenis dokumentasi yang dipergunakan dalam metode ini, yaitu :

1. Data *archival* (arsip)
2. Dokumen (sejarah)⁴⁴

F. Teknik Analisa Data dan Keabsahan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka datanya dipaparkan dengan cara deskriptif. Setelah semua yang dibutuhkan terkumpul, maka selanjutnya penulis melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Untuk proses analisa data maka penganalisa dilakukan dengan analisa domain (domain analysis) maksudnya adalah penelitiannya ditarget untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang

⁴⁴Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Realitions dan Komunikasi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2017)hal. 221-222

diteliti tanpa harus merinci secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek yang diteliti.

Menurut Miles dan Huberman seperti yang dikutip secara bersamaan, yaitu di kutip oleh Ulber. Kegiatan analisa terdiri tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data di artikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.
2. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan verifikasi⁴⁵

Adapun teknik kebasahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi Burhan Bungin menjelaskan bahwa hal ini dapat tercapai dengan cara yaitu :

- 1 Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- 2 Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- 3 Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu

⁴⁵Ulber silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung : PT Refika Aditama 2009) hal,339

- 4 Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi dan pemerintahan.
- 5 Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan⁴⁶

⁴⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Prenada M`edia Group, 2007) hal,265

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan

1 Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 2008 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Kotapinang. Kabupaten Labuhanbatu Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, sehingga wilayah ini memiliki potensi geografis karena dilalui oleh Jalur Lintas Timur Sumatera, yaitu jalur mulai dari Batas Aceh –Tanjung Pura – Binjai – Medan – Lubuk Pakam - Sei Rampah – Tebing Tinggi – Indrapura – Limapuluh – Sei Bejangkar – Kisaran – Simpang Kawat – Pulau Rakyat – Aek Kanopan – Rantauparapat – Simpang Kotapinang – Batas Riau.⁴⁷

Labuhanbatu Selatan termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak diantara koordinat 10 26' 00'' - 20 12' 55'' Lintang Utara dan 990

⁴⁷Profil Dinas Sosial Daerah Labuhan Batu Selatan, hal 4-1

40' 00'' - 1000 26'00'' Bujur Timur. Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki luas wilayah sekitar 3.116,00 Km² (311.600 Ha) yang terdiri dari 5

Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Torgamba yaitu seluas 113.640 Ha atau sekitar 36,47% dari luas total Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil adalah Kecamatan Silangkitang yaitu hanya seluas 30.370 Ha atau sekitar 9,75% dari luas total Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah administratif Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada **Tabel 4.1** berikut :

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas / Area (Km ²)	Persentase (%)
1	Sungai Kanan	Langga Payung	1	8	484,35	15,54
2	Torgamba	Cikampak	-	14	1136,40	36,46
3	Kotapinang	Kotapinang	1	9	482,40	15,48
4	Silangkitang	Silangkitang	-	6	303,70	9,74
5	Kampung Rakyat	Tanjung Medan	-	15	709,15	22,75
Jumlah			2	52	3.116,00	100,00

Sumber : Labuhanbatu Selatan Dalam Angka Tahun 2014

Secara administratif Kabupaten Labuhanbatu Selatan berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Labuhanbatu;

- Sebelah Selatan : Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Sebelah Barat : Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Sebelah Timur : Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

2 Visi dan Misi Kabupaten Labuhan Batu Selatan

a. Visi Labuhan Batu Selatan

" Bersama Membangun Tanah Kelahiran yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera "

b. Misi Labuhan Batu Selatan

- 1) Mewujudkan dan meningkatkan kualitas, fungsi dan peran ekonomi, sosial, budaya dan beragama yang mandiri dan bermartabat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lokal dan berwawasan lingkungan;
- 2) Meningkatkan kualitas infrastruktur yang menunjang pembangunan industri dan wilayah serta kesejahteraan masyarakat;
- 3) Membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui kesetaraan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara, religius berbudaya dan berdaya saing;
- 4) Membangun reformasi birokrasi yang berkelanjutan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

3 Visi dan Misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

a. Visi Dinas Sosial

"Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat di bumi santun berkata bijak berkaya bersama psks (potensi dan sumber kesejahteraan sosial) menjangkau, melindungi, dan mengentaskan pmks (penyandang masalah kesejahteraan sosial)"

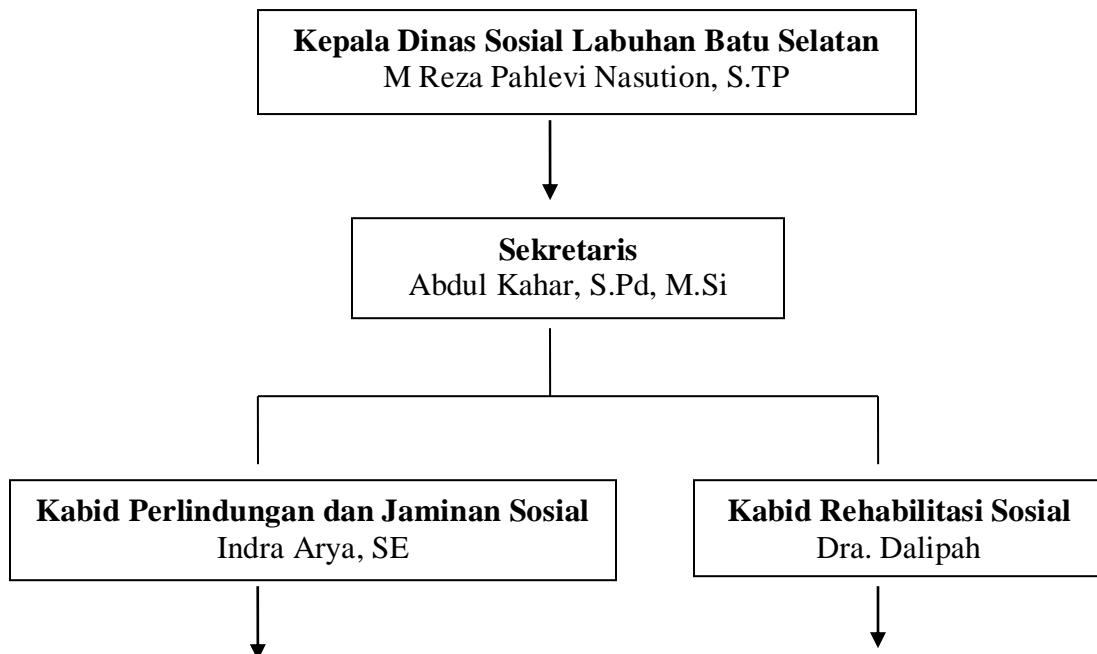
b. Misi Dinas Sosial

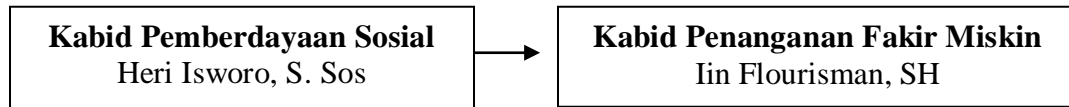
- 1) Mengendalikan mengatasi dan mencegah berkembangnya permasalahan sosial untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia dan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 2) Meningkatkan ketahanan sosial dan membina semangat kesetiakawanan sosial serta kemitraan dalam rangka mewujudkan sebagai satu kesatuan yang utuh dan seimbang;
- 3) Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam system pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial;
- 4) Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
- 5) Memperkuat Ketahanan Sosial melalui upaya memperkecil Kesenjangan Sosial dengan memberikan perhatian kepada

warga masyarakat rentan dan tidak beruntung serta pembinaan semangat kesetiakawanan sosial;

- 6) Meningkatkan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance
- 7) Meningkatkan pengawasan menuju aparat yang taat hukum dan bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN);
- 8) Meningkatkan kualitas pengembangan sistem informasi dan memutakhirkan data PMKS melalui Verivali dan Validasi data secara akurat dan terencana.

4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu Selatan





B. Profil Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Kecamatan Torgamba menempati area seluas 1.136,40 Km² yang terdiri dari 14 desa. Wilayah Kecamatan Torgamba di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kampung Rakyat, di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Provinsi Riau, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kanan dan Kotapinang. Dari 14 desa yang terdapat di Kecamatan Torgamba, yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Bukit Tujuh dengan luas 141,00 Km² dan yang terkecil adalah Desa Teluk Rampah dengan luas 23,00 Km². Kecamatan Torgamba secara wilayah berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu :⁴⁸

- Sebelah Utara : Kecamatan Kampung Rakyat
- Sebelah Timur : Provinsi Riau
- Sebelah Selatan : Kab. Padang Lawas Utara & Provinsi Riau
- Sebelah Barat : Kecamatan Sungai Kanan & Kotapinang⁴⁹

⁴⁸Profil Kecamatan Torgamba, 2018, hal 1

⁴⁹ Ibid... hal. 9

Tabel

Luas Wilayah Menurut Desa/ Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km²)	Persentase
1	Bukit Tujuh	141,00	12,41
2	Sungai Meranti	138,00	12,14
3	Torganda	72,00	6,34
4	Torgamba	113,00	9,94
5	Aek Raso	115,00	10,12
6	Rasau	24,20	2,13
7	Bangai	28,00	2,46
8	Teluk Rampah	23,00	2,02
9	Aek Batu	98,00	8,62
10	Beringin Jaya	105,00	9,24
11	Pinang Dame	37,50	3,30
12	Asam Jawa	59,00	5,19
13	Pangarungan	85,50	7,52
14	Bunut	97,20	8,55
Jumlah		1 136,40	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Penduduk Kecamatan Torgamba tahun 2017 sebanyak 114.638 jiwa yang terdiri dari 58.840 jiwa laki-laki dan 55.798 jiwa perempuan. Jumlah Penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Aek Batu yaitu sebanyak 23.095 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Rasau yaitu sebanyak 1.015 jiwa. Sebagian besar penduduk Kecamatan Torgamba beragama Islam yaitu sebanyak 75,44%, sedangkan yang beragama Kristen Protestan sebanyak 19,43%, dan Kristen Katolik sebanyak 5,07%. Persentase tenaga kerja di Kecamatan Torgamba tahun 2017 sebanyak 74,45%, dimana yang bekerja di bidang pertanian sebanyak 57,35%, industri 21,96%,

PNS/TNI/Polri 1,36% dan lainnya 19,33%. Sebagian besar PNS di Kecamatan Torgamba merupakan Guru SD yaitu sebanyak 220 orang.

C. Kondisi Umum Desa Rasau Kecamatan Torgamba

1 Sejarah Desa Rasau

Nama Desa Rasau di ambil dari nama tumbuhan sejenis pandan yang banyak tumbuh di rawa-rawa sungai raso, yang bernama tumbuhan raso-raso. Desa Rasau didirikan sekitar tahun 1700 M dengan sebutan Huta Raso Malittang bertempat di singgamata (dipinggir Sungai Raso). Kemudian berpindah menjadi Raso Dolok bertempat di pinggir muara Desa Raso saat ini dan terakhir berpindah menjadi Huta Raso bertempat di pinggir sungai Barumun (Keadaan yang sekarang).

Setelah Tahun 1945 Huta Rasau berubah nama menjadi Kampung Rasau (Dikepalai oleh Penghulu) dan pada tahun 1978 berubah menjadi desa Rasau. Desa Rasau semula didirikan oleh seorang suku batak yang bermarga Hasibuan yang bernama Jahanopan yang anak borunya marga daulay. Desa Rasau sejak didirikan sampai tahun 1945 pemerintahnya mengantut sistem kerajaan yang tunduk kepada kesultanan Kota Pinang.⁵⁰

2 Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Rasau adalah salah satu desa di kecamatan Torgamba yang mempunyai luas wilayah 2.868 Ha. Jumlah penduduk Desa Rasau sebanyak 978 jiwa yang terdiri dari 516 laki-laki dan 462 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 232

⁵⁰Profil Desa Rasau Kecamatan Torgamba, 2017, hal 5

KK. Sedangkan jumlah keluarga Miskin (Gaskin) 93 KK dengan persentase 40,08% dari jumlah keluarga yang ada di Desa Rasau.

Batas-batas administratif pemerintah Desa Rasau Kecamatan Torgamba sebagai berikut :

- Sebelah Utara : PTPN 3 dengan Desa Pasir Tuntung
- Sebelah Timur : Desa Rasau
- Sebelah Selatan : Desa Pasir Lancat /PALUTA
- Sebelah Barat : Desa Bangai dengan Desa Teluk Rampah

Luas wilayah Desa Rasau adalah 2.868 Ha dimana 90% berupa daratan yang berpotografi datar dan 10% daerah berbukit 65% yang dimanfaatkan untuk perkebunan sawit dan karet 35% yang dikelola masyarakat, iklim desa tropis, sebagaimana desa-desa lain diwilayah mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Rasau Kecamatan Torgamba.

D. Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan

Peran atau upaya-upaya yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak dalam menanggulangi angka kemiskinan yang timbul, dari beberapa program kerja dan kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan di antaranya adalah sebagai berikut;

- 1 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Bantuan pembangunan perumahan komunitas adat terpencil (KAT)
 - b. Bantuan perbaikan perumahan fakir miskin/rumah tidak layak huni.
 - c. Pembinaan dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).
- 2 Program pembinaan panti asuhan.
- 3 Program pembinaan anak terlantar.

Wawancara dengan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial LabuhanBatu

Selatan bapak Indra mengatakan :

Program PKH yang telah berjalan selama ini terus kami kembangkan dengan tujuan masyarakat bisa mandiri, salah satunya melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilaksanakan ke masyarakat melalui pendamping PKH dan penerima PKH. Ini juga salah satu cara kami untuk penyaluran bantuan kepada penerima PKH di desa-desa dengan tujuan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga penerima PKH.

Berdasarkan apa yang telah di jabarkan sebelumnya, penulis menganalisa bahwa spesifikasi dari upaya-upaya yang di lakukan Dinas Sosial dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan yaitu melalui program pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) dengan cara memberikan pembinaan dan bantuan modal terhadap kelompok-kelompok usaha sesuai dengan bidang usaha yang di berikan oleh

Dinas Sosial tersebut terhadap kelompok usaha yang di buat oleh masyarakat di Desa Rasau Kecamatan Torgamba.

E. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan PKH di Desa Rasau Kecamatan Torgamba

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Torgamba sudah berjalan dengan baik. Rumah Tangga Sangat Miskin Program Keluarga Harapan (RTSM PKH). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Rasau memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Rasau yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai PKH itu sendiri, antara lain faktornya sebagai berikut :

1. Komunikasi

Setiap kebijakan perlunya komunikasi dalam pelaksanaanya agar terjalin kebijakan dengan baik dan benar. Karena komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi kebijakan dari pembuat kebijakan yaitu pemerintah kepada pelaksana kebijakan. Perlu dilakukan hal berikut :

- a. Adanya DIKLAT (Pendidikan dan pelatihan) kepada pendamping PKH agar mereka mereka bisa menyiapkan apa yang perlu disiapkan dalam menjalankan tugas ke masyarakat.
- b. Perlu adanya Bimtek Service provider yang artinya adanya pertemuan dan kerja sama saling mengenal dan memahami antara petugas kesehatan,

pendidikan, dinas sosial dan pendamping untuk membahas sosialisasi terkait PKH agar masing-masing pihak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan benar.

- c. Komunikasi yang baik menjadi penentu berhasil atau tidak kebijakan dimana pendamping PKH giat dan sesuai SOP dalam melakukan sosialisasi mengenai Program Keluarga Harapan kepada penerima PKH maupun calon penerima PKH.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Kemampuan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan PKH serta jumlah tenaga sesuai dengan jumlah masyarakat yang akan menerima Program Keluarga Harapan

b. Sumber Daya Anggaran

Kebutuhan penerima dengan anggaran yang sudah ditentukan dan sudah sesuai dengan kebijakan yang dilakukan yang bersumber dari dana APBN dan APBD

c. Sumber Daya Peralatan

3. Sistem Pemerintahan dalam Pelaksanaan kebijakan

- 4. Tingkat keseriusan masyarakat dalam memberdayakan kelompok atau komunitasnya yang masih rendah. Contoh; pemberian dana bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial tidak digunakan sebagaimana semestinya. Lokasi

yang cukup jauh dan sulit untuk di tempuh dalam rangka melakukan pengamatan (pengawasan) secara langsung terhadap kelompok atau komunitas yang akan diberdayakan.

F. Strategi Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan melalui PKH

Program Keluarga Harapan adalah salah satu strategi yang dibuat kementerian Sosial dan dilaksanakan dinas sosial. Ada beberapa strategi lainnya antara lain masyarakat di bawah garis kemiskinan nasional (GKN) diberikan bantuan pangan (rastra) dan bantuan pangan non tunai (BPNT), serta bantuan iuran jaminan kesehatan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun peneliti hanya membahas strategi yang dilakukan dinas sosial Labuhan batu Selatan melalui Program keluarga Harapan.

Dalam mengatasi kemiskinan Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. PKH, bertujuan mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. PKH juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil).⁵¹

⁵¹Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan

Sejalan dengan wawancara bapak Indra Arya, SE selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial LabuhanBatu Selatan mengatakan

PKH yang saat ini ada dan sudah berjalan sejak 2011 sudah sangat membantu masyarakat terutama bagi pendidikan dan kesehatan. Tentu melalui PKH kami tidak hanya menyalurkan uang tunai namun kami juga melakukan pemberdayaan ekonomi bagi penerima PKH antara lain Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH. Program itu bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Selain itu ada pula kredit usaha rakyat (KUR). Kami tidak ingin hanya member uang tunai yang akhirnya habis dan membuat masyarakat ketergantungan dengan hal itu. Jadi kami beri mereka kegiatan KUBE yang ada di dalam PKH itu sendiri. Untuk pendidikan sendiri kami memberikan bantuan berupa bantuan pendidikan berupa beasiswa, kegiatan pengembangan fasilitas operasional sekolah dan kegiatan pengembangan. Untuk kesehatan ibu hamil kami memberikan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas agar ibu dan calon baik dalam keadaan sehat hingga melahirkan.⁵²

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Indra Arya mengenai strategi yang digunakan Dinas Sosial Labuhan Batu Selatan dalam mengatasi Kemiskinan melalui PKH ialah sebagai berikut :

1. Melakukan pemberdayaan Ekonomi berbasis KUBE bagi penerima PKH, lalu kegiatan keterampilan yang bisa meningkatkan daya jual suatu barang dan menambah pemasukan penerima PKH.
2. Bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini. Bantuan ini diberikan kepada anggota keluarga rumah tangga miskin yang masih berusia sekolah melalui pemberian uang tunai kepada keluarga yang berasal dari rumah tangga miskin, dimana sebagai

⁵²Wawancara dengan bapak Indra Arya, SE. Pukul 09.45 WIB, Tanggal 19 Desember 2019

imbalannya keluarga penerima diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai dengan ketentuan. Termasuk dalam strategi ini memberikan insentif bagi kepala keluarga rumah tangga miskin untuk memasukkan anak-anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah, seperti pekerja anak, untuk kembali ke bangku sekolah

3. Bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua berkaitan dengan kesehatan dan gizi (*parenting education*) melalui pemberi pelayanan kesehatan yang ditunjuk. Bantuan ini diberikan kepada ibu-ibu hamil atau yang sedang mengasuh anak balita dalam rumah tangga miskin dengan syarat ibu-ibu hamil atau yang sedang mengasuh anak balita tersebut memeriksakan kesehatan mereka atau anak balita mereka ke Puskesmas

Strategi yang dilakukan Dinas Sosial ialah untuk menunjukkan perannya dalam mengatasi kemiskinan di Desa Rasau Kecamatan Torgamba ini dapat dikatakan telah berperan dengan baik akan tetapi peran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui PKH belum mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari berbagai strategi yang di laksanakan oleh Dinas Sosial tersebut, Dinas Sosial dapat di kategorikan sudah “berperan” akan tetapi, peran yang di laksanakan oleh Dinas sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan masih belum berjalan secara maksimal, pada umumnya kerja sama yang terjalin antara Dinas Sosial dan kelompok usaha bersama (KUBE) Di Desa Rasau masih belum maksimal dalam mencapai tujuan yang di inginkan. Hal ini di karenakan antara kedua belah pihak belum mengetahui secara jelas manfaat yang terdapat pada kerja sama yang terjalin. Kelompok usaha tersebut masih ada yang belum menggunakan bantuan yang telah di berikan untuk menjalankan usaha pemberdayaan kelompok dalam rangka meningkatkan taraf dan kualitas hidup. hal ini di sebabkan karena tingkat kesadaran pihak kelompok usaha masih rendah sehingga bantuan yang di berikan oleh Dinas Sosial di gunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, hal lain yang menjadi penunjang atas terselenggaranya pelaksanaan program-program adalah melalui pemberdayaan koperasi dan usaha kecil yang disertai semangat kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Rasau

G. Respon Masyarakat Adanya PKH

Respon masyarakat sendiri ialah balasan atau tanggapan secara baik ataupun buruk yang diberikan atas rangsangan yang didapat oleh masyarakat yang bertujuan pemenuha kebutuhan hidup, mempertahankan hidup mereka.

Program Keluarga Harapan yang menjadi salah satu strategi dinas sosial dalam mengatasi kemiskinan disambut baik oleh masyarakat. Dengan adanya PKH bagi penerima bantuan sangat membantu terutama untuk pendidikan anak-anaknya.

Dari wawancara dengan ibu Siti Asdah Siregar

Ya semenjak ibu dapat PKH alhamdulillah sangat membantu buat hidup, apalagi buat sekolah anak, ibu ada 2 yang sekolah satu kelas 5 SD dan satu lagi kelas 2 SMP. Kalau yang SD ibu dapat 900 ribu kalau yang SMP 1.5 juta, biasa pencairan 3 bulan sekali ibu dapat total 825 ribu. Alhamdulillah bisa buat tambahan dirumah.⁵³

Begitu juga dengan wawancara bersama ibu Dahlia responnya sangat baik.

PKH bagi kami ibu-ibu sangat membantu terutama untuk pendidikan anak-anak, di PKH kami juga diberikan pelatihan untuk mengisi waktu. Seperti kemarin kami diajarin cara buat keset dari kain perca. Alhamdulillah jd tambahan ilmu sekaligus kumpul dengan ibu-ibu lain. Biasa lha kalau uda kumpul pasti gosip. Anak ibu kelas 3 SD tiap 3 bulan sekali ibu dapat 225 ribu dari PKH. Walaupun sich nominalnya tidak besar tapi alhamdulillah.⁵⁴

Temuan dari wawancara dengan penerima PKH dapat ditarik kesimpulan bahwasannya respon dari masyarakat untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sangat baik dan mereka senang dengan adanya PKH yang diberikan pemerintah saat ini. Masyarakat sudah sangat mengetahui program yang telah dilaksanakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan bagi masyarakat miskin.

Masyarakat disini merasa senang dan mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan dari Program Keluarga Harapan. Hal ini terbukti dari keterlibatan peserta dalam mengikuti setiap kegiatan pertemuan yang diadakan antara masyarakat dengan pendamping PKH. Masyarakat Desa Rasau aktif mengikuti kegiatan

⁵³Wawancara dengan Ibu Siti Asdah, pukul 17.05 wib tanggal 21 Desember 2019

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Dahlia, Pukul 16.45 wib, tanggal 22 Desember 2019

pertemuan. Dalam kegiatan pertemuan masyarakat saling berbagi dan bertukar informasi dengan sesama ibu penerima bantuan Program Keluarga Harapan beserta pendamping seputar Program Keluarga Harapan.

Masyarakat Desa Rasau terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya bantuan pendidikan masyarakat sangat terbantu dan bagi ibu-ibu hamil dan menyusui sangat terbantu dengan adanya PKH membantu mereka secara financial untuk memenuhi nutrisi bagi ibu dan bayinya.

Masyarakat telah merasakan dampak langsung yang positif dari Program Keluarga Harapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat sangat baik responnya dan menilai Program Keluarga Harapan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Rasau.

H. Hasil yang dicapai Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan melalui Program PKH

Dinas Sosial sebagai Garda terdepan sebagai Fasilitator serta Pengawas berjalannya Program Keluarga Harapan memiliki pencapaian yang telah dilakukan dari awal 2007 dimana pertama kali PKH dikeluarkan hingga saat ini sudah berjalan 12 tahun. Secara spesifik pencapaian Dinas Sosial melalui PKH dapat dilihat dari meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta

PKH, meningkatnya taraf pendidikan peserta PKH, meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak umur dibawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota RTSM/keluarga sangat miskin(KSM).

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kesadaran akan pentingnya kesehatan sudah meningkat dengan adanya kesehatan gratis yang diberikan kepada balita dan ibu hamil melalui program PKH dengan bantuan berupa uang tunai setiap tiga bulan sekali untuk asupan gizi. Pelayanan puskesmas yang gratis dengan kerjasama dengan PKH untuk rajin dan rutin memeriksa kandungan ibu hamil dan tumbuh kembang balita serta memperhatikan gizinya. Adanya peningkatan dan perubahan status gizi dengan adanya Program Keluarga Harapan dimana Dinas sosial berperan sebagai fasilitator dan pengawas berjalannya program ini di masyarakat.

Hasil yang dicapai adanya perubahan yang dialami responden terkait kemampuan memenuhi kebutuhan gizi dimana penerima PKH mampu mengkonsumsi susu sekali dalam kurun waktu satu minggu dan konsumsi nasi lebih dari dua kali dalam sehari. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian Dinas Sosial melalui program PKH pada tingkat status gizi di Desa Rasau tercapai.

2 Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Pelayanan Pendidikan yang diterima para peserta PKH mendapatkan hasil yang baik. Adanya perubahan yang dirasakan akan pelayanan pendidikan setelah menjadi peserta PKH. Penerima PKH mampu membeli kebutuhan-kebutuhan sekolah anak

menggunakan uangnya sendiri yang berasal dari bantuan PKH. Hasilnya penerima bantuan PKH menjadi mampu membeli seragam sekolah, alat tulis, sepatu, bayar spp dan kebutuhan lainnya. Pencapaian ini dikuatkan dengan hasil wawancara bersama ibu Safrida

Kebutuhan hidup sekarang nak semakin mahal sedangkan ibu hanya ibu rumah tangga, suami ibu buruh. Untuk kebutuhan sekolah anak kami selalu usahakan dan sanggup-sanggupkan, ya sampai terkadang kami cari pinjaman. Agar anak kami bisa terus sekolah. Ya sekarang Alhamdulillah semenjak saya dan keluarga penerima PKH tiap tiga bulan ada bantuan dari pemerintah. Buat sekolah anak saya satu SD dan satu lagi SMP. Uang dari PKH saya gunakan beli sepatu, seragam dan kebutuhan sekolah mereka yang lain, nak.

Bantuan PKH yang diberikan telah mencapai hasil yang diinginkan Dinas Sosial untuk meringankan dan membantu masyarakat miskin dari segi pendidikan agar tidak ada kesenjangan dari segi biaya yang selama ini menjadi masalah kompleks masyarakat kurang mampu untuk tetap terus membuat anaknya tetap bersekolah. Dengan tujuan adanya bantuan PKH ini Dinas Sosial ingin masyarakat miskin keluar dari kemiskinan melalui pendidikan anaknya. Karena pendidikan menjadi faktor penting yang dapat membuat seseorang ataupun keluarga keluar dari kemiskinan. Pendidikan akan memberikan pengaruh dalam jangka panjang dalam memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga.

Hasil yang dicapai Dinas Sosial adanya perubahan yang dialami penerima PKH terkait kemampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekolah anak seperti mampu membeli buku, seragam, alat tulis dan peningkatan kehadiran anak peserta PKH di

sekolah pada setiap bulannya. Menunjukkan bahwa pencapaian melalui program keluarga harapan pada tingkat akses pelayanan pendidikan di Desa Rasau tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Sosial sebagai fasilitator dan pengawas berjalannya Program Keluarga Harapan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah kemiskinan di wilayah administrasinya. Peranan yang dilakukan Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan mengadakan Pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi penerima PKH di Desa Rasau.

Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial memiliki strategi pelaksanaannya yaitu :

- Pemberdayaan ekonomi berbasis KUBE
- Pemberian beasiswa kepada siswa baik SD,SMP maupun SMA untuk biaya pendidikannya.
- Ibu hamil dan balita diberikan pelayanan kesehatan gratis dan bantuan PKH yang dilakukan tiga bulan sekali untuk pencairan dana.

Program Keluarga Harapan yang berjalan saat ini sangat membantu masyarakat terutama untuk pendidikan dan kesehatan yang dimana hal itu menjadi tujuan PKH untuk mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan mutu kesehatan dan tingkat pendidikan keluarga miskin penerima PKH. Dalam pelaksanaannya melalui PKH dinas sosial telah mencapai hasil yang saat ini dikatakan sudah tercapai dimana pelayanan kesehatan di Desa Rasau sudah lebih baik dan rasa peduli akan kesehatan

dan gizi semakin tinggi. Begitu juga dengan pendidikan. Orang tua terbantu dengan adanya bantuan beasiswa pendidikan PKH untuk keperluan pendidikan mereka.

B. Saran

Setiap tahunnya PKH harus memperbaharui data penerima bantuan PKH, agar masyarakat yang sudah mampu dapat di berhentikan menjadi penerima bantuan PKH, sehingga masyarakat miskin lainnya yang belum menjadi peserta PKH dapat dijadikan peserta dan bisa menerima bantuan

Harus adanya Peningkatan intensitas sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Sosial dalam rangka memberikan pemahaman dan mensosialisasikan secara intensif terkait penanggulangan kemiskinan serta permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, baik di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi.. Peningkatan dan perencanaan ulang untuk KUBE agar lebih tercapai tujuan pemberdayaan masyarakat untuk keluar dari zona kemiskinan.

Untuk penerima PKH jadilah penerima bantuan yang bijaksana dalam penggunaan bantuan yang diberikan pemerintah bukan untuk keperluan lain. Tingkatkan kehadiran dan diskusi rutin sesama penerima PKH agar pemberdayaan yang dilakukan berjalan sesuai tujuan tidak hanya hadir ketika informasi pencairan dana PKH. Karena PKH bukan hanya memberikan bantuan uang tunai melainkan pelatihan untuk diri penerima PKH.

Daftar Wawancara

A. Identitas Informan

- 1 Nama :
- 2 Pekerjaan :
- 3 Alamat :
- 4 Pendidikan Terakhir :
- 5 Usia :..... Tahun

B. Daftar Pertanyaan

- 1 Kapan Program Keluarga Harapan dilaksanakan di Desa ?
- 2 Siapa sasaran Program Keluarga Harapan ?
- 3 Berapa besar nilai bantuan yang diterima peserta PKH ?
- 4 Apakah PKH sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku ?
- 5 Apakah penyaluran bantuan tepat waktu atau tidak ?
- 6 Apakah bantuan PKH yang diberikan membantu penerima PKH ?
- 7 Bagaimana pemanfaatan bantuan yang dilakukan penerima PKH ?
- 8 Apa saja program pemberdayaan kelompok peserta PKH di desa Rasau ?
- 9 Fasilitas apa saja yang sudah diperoleh penerima PKH ?
- 10 Bagaimana Respon Penerima PKH dengan adanya PKH bagi mereka ?
- 11 Bagaimana Peran dan Strategi Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan melalui PKH ?
- 12 Bagaimana kebijakan Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan ?
- 13 Apa hasil yang telah dicapai Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan melalui PKH di Desa Rasau ?

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran & Terjemahan Spesial For Women*, Depertemen Agama RI
- Anonimous. 1996, *Kamus Indonesi* , Jakarta: Balai Pustaka.
- Burhangin Bungin H.M., 2007, *Penelitian Kualitatif Edisi kedua*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Cohen Bruce J, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar, Teremahan. Sahat Simamora*, Jakarta: Reineka Cipta.
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2004, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* Jakarta : kencana.
- Efendi, Tadjuddin Noer. 1993, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Hanurawan Fattah, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Is Bandi Rukminto Adl, 2013, *Kesejahteraan Sosial Pekerja Sosial Pemabngunan Sosial pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasim Muslim, 2010, *Karakteristi Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Indo Media Hakcipta.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004, *Otonomi Daerah - Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakary.
- Muammar Himawan. 2004, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004, *Pembangunan Wilayah- Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Ridlo, Mohammad Agung, 2001, *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: Penerbit Unissula Press.

Perubahan pertama keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial PKH 2019*, Kementerian Sosial Republik Indonesia. lampiran

Prajudi Admosudirjo. 2001. *Teori Kewenangan*. PT . Rineka Cipta Jakarta.

Rusli, Said (ed). *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin: Suatu Tinjauan dan Alternatif*. Jakarta: PT Gra1995, media Widiasarana Utama dan Institut Pertanian Bogor.

Sajogyo..1996, *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.

Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). 1997, *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko.

Soekanto Soejono, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.

Sutrisno Hadi, 1989, *Metodologi Research Jilid II* , Yogyakarta: Andi Offset.

Soiman, 2017, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU.

Sumber Lainnya

<http://dinsos.sumutprov.go.id/statis-4/tugas-pokok-dan-fungsi.html>

<https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1> diakses 26 Desember 201

<http://www.Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.com>

Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 17 tahun 2010

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 Ayat 1

Permensos 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3

Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN

Profil Kecamatan Torgamba, 2018

Profil Desa Rasau Kecamatan Torgamba, 2017

Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan

UU No 40 tahun 2004 tentang system jaminan sosial, UU No 13 tahun 2011

www.BPS.SUMUT.com

Wawancara

Wawancara dengan bapak Indra Arya, SE. Pukul 09.45 WIB, Tanggal 19 Desember 2019

Wawancara dengan Ibu Siti Asdah, pukul 17.05 wib tanggal 21 Desember 2019

Wawancara dengan Ibu Dahlia, Pukul 16.45 wib, tanggal 22 Desember 2019

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Williem Iskandar Pasar V Telp. 6615683 – 6622925, Fax. 6615683 Medan Estate 20371

Nomor: B-2851/DK.I/TL.00/11/2019

Medan, 5 November 2019

Lamp : -

Prihal : **Mohon Izin Riset**

Yang Terhormat :
Kepala Dinas Sosial Kotapinang
Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan yaitu :

Nama	: Vickry Aulia Hidayah Hsb
NIM	: 13154033
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Tempat Tgl Lahir	: Medan, 12 Desember 1997.
Alamat	: Jl. Kanti I No.20 Medan Sunggal

sedang melaksanakan Penulisan Skripsi berjudul : **“Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui BLT, PKH, Dan SEMBAKOH Di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan”**. Untuk kelancaran penulisan dimaksud, mohon bantuan Bapak memberikan keterangan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan



Dr. En Brata Madya, M.Si

NIP. 19670610 199403 1 003

Tembusan:

-Ketua Prodi PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lintas Simaninggir Kotapinang
KOTAPINANG

Kode pos : 21464

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/343/BKBP/2019

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B-2851/DK.I/TL.00/11/2019, Tanggal 05 November 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian yang akan dilakukan oleh :

Nama : **Vickry Aulia Hidayah Hasibuan**
Alamat : **Rasau, Kec.Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan**
NIM : **13154033**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Judul penelitian : **Pean Dinas Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui BLT, PKH, dan SEMBAKOH Di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan**
Tujuan Penelitian : **Mendapatkan Data-Data Dalam Rangka Menyelesaikan Tugas Akhir Perkuliahan**
Lokasi Penelitian : **Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan.**
Anggota Penelitian : **-**
Lama Penelitian : **26 November 2019 - 26 Januari 2019**
Bidang Penelitian : **Sumber Daya Manusia**
Status Penelitian : **Baru**

MEMBERITAHUKAN BAHWA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberi izin atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Mematuhi Undang-undang dan Norma-norma yang berlaku dimasyarakat.
2. Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum pada saat kegiatan dilaksanakan.
3. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar rekomendasi yang diberikan;
4. Apabila masa berlaku rekomendasi sudah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, dapat diperpanjang kembali ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Demikian Rekomendasi ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Kotapinang, 26 November 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



H. ZULKIFLI SIREGAR, S.Sos
PEMBINA IV / a
NIP : 19680803 199103 1 004

Tembusan :

1. Yth. Bpk Bupati Labuhanbatu Selatan (sebagai laporan)
2. *Pertinggal*

Scanned with
CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS SOSIAL**

Jln. Bukit No: 46C-46D Kotapinang, Telp./Fax. : 0624-496535
Em@il: dstktlabusel_datasos@yahoo.co.id
KOTAPINANG

Kode pos 21464

Kotapinang, 26 November 2019

Nomor : 460/083/DINSOS/2019
Sifat :
Perihal : Surat Balasan Telah
Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Dakwah dan komunikasi
UIN Sumatera Utara
di -
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan adanya surat Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara, tanggal 5 November 2019 dan Surat Rekomendasi izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) tanggal 26 November 2019 yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : VIKRY AULIA HIDAYAH HSB
Nim : 13154033
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Alamat : Jl. Kanti I No. 20 Medan Sunggal
Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan BLT, PKH, dan Sembako di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanabtu Selatan.

Setelah mendapat data – data dalam rangka penelitian dimaksud, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Demikian surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini kami perbuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

M. REZA PAHLEVI NASUTION, S. STP

**PEMBINA
NIP. 19850417 200412 1 001**

Dokumentasi



Bersama masyarakat penerima PKH Desa Rasau





Pendataan dan pencairan dana PKH Desa Rasau Kec.Torgamba

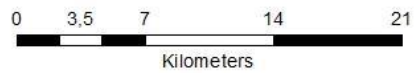




Kegiatan pemberian materi mengenai PKH oleh Petugas PKH Desa Rasau di rumah ketua kelompok penerima PKH Desa Rasau



Penyuluhan dan pendataan penerima PKH dan Calon Penerima PKH yang baru di Aula Desa Rasau Kec.Torgamba



Kecamatan Torgamba